Available online at: https://journal.pencerah.org/index.php/jspi

Journal of Social and Policy Issues

E-ISSN: 2807-3843 I P-ISSN: 2829-8632

# Internal Political Party Consolidation: An Analysis of the NasDem Party's Vote Increase in the 2024 General Election in Padang City

*Aufa Rizky Fan Surya, Aidinil Zetra, Asrinaldi Asrinaldi*
*Universitas Andalas, Padang 25175, Indonesia*

ARTICLE INFORMATION

Received: February 17, 2026
Revised: August 09, 2026
Accepted: September 25, 2026
Available online: September 30, 2026

KEYWORDS

Party consolidation, Party institutionalization, Political Personalization, Nasdem Party, Local Politics

CORRESPONDENCE

Name: *Aufa Rizky Fan Surya*
E-mail:

A B S T R A C T

This study explores how the NasDem Party's Padang branch reversed its 2019 electoral collapse into a seven-seat surge in 2024. Arguing against explanations relying solely on Anies Baswedan's coattail effect, it attributes this resurgence to combining internal institutionalization with external political opportunities. Using a qualitative case study and Harmel and Svåsand's (2019) framework, interviews with various stakeholders reveal that internal consolidation involved organizational restructuring creating 104 branch-level boards with 1,200 cadres and enforcing a "no-dowry" recruitment policy, reinforced by "Restoration of Indonesia" political education. However, the party machine still remains heavily dependent on key elite figures. Externally, while Baswedan's candidacy restored the party's relevance among rational Minangkabau voters, the Minangkabau Customary Council's (LKAAM) assumed role as a cultural broker proved merely incidental. The study concludes that NasDem Padang's durability is fragile, relying on electoral pragmatism and political personalization whose sustainability without external figureheads remains untested.

## INTRODUCTION

Partai politik merupakan salah satu arena terpenting dalam proses konsolidasi demokrasi. Linz dan Stepan (1996) menempatkan *political society* sebagai satu dari lima arena yang harus terkonsolidasi agar demokrasi dapat berjalan stabil, bersama dengan masyarakat sipil, supremasi hukum, birokrasi negara, dan masyarakat ekonomi. Dalam konteks negara transisi seperti Indonesia, kegagalan partai politik menjalankan fungsi representasi dan pengawasan kerap menjadi titik masuk bagi kemunduran demokrasi atau *democratic decline* (Asrinaldi & Yusoff, 2023; Kurniawan & Handayani, 2022; Mietzner, 2025). Kondisi kemunduran demokrasi (*democratic decline*) tidak dapat dilepaskan dari peran instrumen konsolidasi demokrasi, salah satunya partai politik. Pelemahan demokrasi sering kali bermula dari ketidakmampuan partai politik menjalankan fungsi pengawasan akibat kooptasi kepentingan oligarki yang begitu kuat (Deni, 2016; Faedlulloh dkk. 2023). Untuk memastikan kooptasi tersebut berjalan efektif dan meminimalisir resistensi dari arus bawah, elit penguasa perlu menciptakan struktur partai yang solid dan terkendali penuh. Oleh karena itu, kapasitas internal partai politik atau yang sering disebut sebagai pelembagaan partai (*party institutionalization*) menjadi determinan penting bagi keberlangsungan konsolidasi demokrasi di tingkat nasional maupun lokal (Ivanny, 2023).

Pelembagaan partai dapat dipahami sebagai proses partai politik memperoleh sifat-sifat organisasi yang tahan lama (*durable*), bernilai pada dirinya sendiri, dan dipersepsikan demikian oleh pihak lain (Randall & Svåsand, 2002). Beberapa kerangka analitis telah dikembangkan untuk mengukur pelembagaan ini, di antaranya empat dimensi *roots in society*, *autonomy*, *level of organization*, dan *coherence* dari Basedau dan Stroh (2011), lima indikator *party institutionalization* dari Musella dan Versci (2019) yang meliputi otonomi pengambilan keputusan, daya tahan, rutinisasi, *reification*, dan keterakaran sosial. Kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada tataran institusional dan belum banyak mengaitkannya secara langsung dengan bagaimana elite lokal mengonsolidasikan kekuasaan dalam konteks politik lokal. Hal tersebut menjadi sebuah celah yang menjadi titik awal penelitian ini.

Secara nasional, Partai NasDem menunjukkan tren elektoral yang positif sejak pertama kali berkontestasi. Pada Pemilu 2014, NasDem menjadi satu-satunya partai baru yang lolos ke parlemen dengan 35 kursi DPR RI, kemudian meningkat menjadi 59 kursi pada 2019, dan 69 kursi pada 2024 setelah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, sebuah langkah yang relatif berani karena Anies saat itu justru didukung oleh Prabowo Subianto, figur yang berseberangan secara politik dengan NasDem pada periode sebelumnya. Namun, tren positif di tingkat nasional ini tidak serta-merta linear dengan capaian di tingkat daerah, khususnya di Sumatera Barat, yang dikenal memiliki konstelasi partai dominan yang cair dan berganti setiap periode yakni Demokrat (2009), Golkar (2014), Gerindra (2019), dan PKS (2024).

**Tabel 1.** Partai Politik Dominan di Sumatera Barat Tahun 2009–2024

| Tahun | Partai Dominan | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| 2009 | Demokrat | 14 |
| 2014 | Golkar | 9 |
| 2019 | Gerindra | 14 |
| 2024 | PKS | 10 |

*Sumber: diolah dari berbagai sumber*

https://doi.org/10.58835/jspi.v6i3.748
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Some rights reserved

Di Kota Padang, dinamika Partai NasDem justru menunjukkan pola yang lebih ekstrem. Pada Pemilu 2014, NasDem berhasil meraih empat kursi DPRD Kota Padang. Namun, akibat sentimen negatif pemilih Minangkabau terhadap posisi NasDem sebagai pendukung garis keras Joko Widodo (Sakti, 2020), perolehan kursi partai pada Pemilu 2019 merosot tajam menjadi hanya satu kursi dengan 17.535 suara sah (TagarId, 2019). Kondisi ini berbalik secara drastis pada Pemilu 2024, ketika NasDem meraih 59.770 suara sah dan berhasil mengonversinya menjadi tujuh kursi DPRD Kota Padang.

Fenomena lonjakan tujuh kali lipat ini menarik untuk dikaji secara kritis. Penjelasan yang paling sering muncul di permukaan adalah efek ekor jas pencalonan Anies Baswedan, yang dipandang sangat diterima oleh pemilih rasional Sumatera Barat (Surya, 2025). Akan tetapi, penjelasan tunggal tersebut menjadi tidak memadai ketika dibandingkan dengan capaian PKS sebagai partai pengusung Anies lainnya, justru mengalami penurunan kursi dari sembilan menjadi tujuh. Jika variabel "Anies" benar-benar menjadi faktor tunggal dan kuat, semestinya partai-partai pengusung lain juga mengalami kenaikan, bukan stagnasi atau penurunan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat variabel lain yang lebih determinan, yaitu kesiapan infrastruktur dan strategi konsolidasi internal partai itu sendiri.

Kajian terdahulu mengenai konsolidasi dan pelembagaan partai politik di Indonesia telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, namun menyisakan sejumlah celah yang signifikan. Pertama, Razaqtiar (2016) menelaah konsolidasi internal Partai Golkar dalam memenangkan Pilkada Karanganyar 2013 melalui diklat fungsionaris dan mobilisasi anggota DPRD. Meskipun studi ini berhasil menggambarkan dinamika mobilisasi sumber daya partai dalam konteks pilkada, cakupannya terbatas pada strategi kampanye jangka pendek menjelang pemilihan dan tidak mengkaji proses pelembagaan partai secara berkelanjutan lintas siklus pemilu. Kedua, Anawati dan Al-Hamdi (2020) menunjukkan bagaimana PKS mempertahankan soliditas organisasinya pada Pemilu 2014 di tengah krisis akibat kasus korupsi presiden partainya, sebuah temuan yang menegaskan pentingnya mesin partai sebagai "tameng" elektoral. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada kondisi mempertahankan capaian di tengah krisis eksternal, bukan pada proses pemulihan dari guncangan elektoral yang pernah dialami sendiri akibat keputusan internal partai. Ketiga, Kristiyanto dan Hanief (2022) menjelaskan transformasi kelembagaan PDI Perjuangan selama dua dekade (1999–2019) melalui penguatan ideologi dan depersonalisasi. Meskipun komprehensif, kajian ini beroperasi di level nasional dan tidak menyentuh bagaimana dinamika lokal khususnya di daerah dengan identitas kultural yang kuat seperti Minangkabau membentuk corak konsolidasi partai yang berbeda dari pusat. Keempat, Royyan, Sulaksono, dan Wijaya (2022) menelusuri konsolidasi struktural dan agenda politik PDIP Pekalongan pasca-konflik internal 2020, tetapi kajiannya terfokus pada rekonsiliasi internal pasca-perpecahan elite dan mengabaikan dimensi konsolidasi eksternal serta pemanfaatan momentum figur nasional sebagai variabel akselerator. Kelima, studi yang paling relevan dengan penelitian ini adalah Babas dan Hidayat (2024), yang menganalisis pelembagaan Partai NasDem di tingkat nasional pada periode 2014–2019 dan menemukan bahwa, meskipun NasDem mengalami kenaikan suara tertinggi di antara partai lain, partai ini menghadapi masalah pada dimensi koherensi dan otonomi akibat intervensi pusat ke daerah serta akar sosial yang masih lemah. Namun studi ini berhenti pada level nasional agregat dan justru tidak menjelaskan bagaimana daerah-daerah yang terdampak secara lokal seperti Kota Padang dalam merespons, bertahan, dan kemudian bangkit secara dramatis.

Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini berfokus pada level lokal dan justru mengangkat fenomena yang berkebalikan yang dapat dilihat di tingkat nasional NasDem mengalami tren naik pada 2014–2019, di Kota Padang partai ini justru mengalami guncangan elektoral terburuknya pada periode yang sama, sebelum akhirnya bangkit secara dramatis pada 2024. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal yang belum dijawab oleh literatur sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengkaji kasus pemulihan pascaguncangan elektoral akibat keputusan internal partai sendiri dan bukan sekadar tren kenaikan regular sehingga menawarkan perspektif tentang *survivability* partai yang lebih kritis. Kedua, penelitian ini secara eksplisit mengintegrasikan dua arena konsolidasi yang biasanya dibahas terpisah, yaitu konsolidasi internal melalui rekrutmen elite pragmatis dan restrukturisasi organisasi, serta konsolidasi eksternal melalui pemanfaatan momentum figur nasional dan legitimasi kultural lokal, untuk menjelaskan bagaimana partai non-petahana dapat membalikkan kekalahan menjadi kemenangan signifikan tanpa bergantung pada dominasi birokrasi pemerintahan daerah. Ketiga, penelitian ini menguji secara empiris asumsi peran institusi adat lokal (LKAAM) dalam konsolidasi elektoral yang selama ini hanya beredar di tingkat narasi media tanpa verifikasi ilmiah yang memadai.

Penelitian ini memiliki urgensi yang kuat dari dua dimensi. Secara empiris, lonjakan kursi NasDem Kota Padang dari satu menjadi tujuh dalam satu siklus pemilu merupakan anomali elektoral yang belum pernah dikaji secara sistematis, padahal fenomena ini menawarkan pelajaran penting tentang kapasitas adaptasi partai di level lokal. Secara teoretis, sebagian besar kajian pelembagaan partai di Indonesia masih terpusat pada level nasional dan partai-partai besar yang sudah mapan, sementara dinamika konsolidasi partai menengah di daerah dengan identitas budaya kuat seperti Minangkabau nyaris luput dari perhatian akademis. Mengisi celah ini menjadi penting, sebab proses demokratisasi Indonesia sejatinya terjadi di tingkat lokal, dan pemahaman tentang bagaimana partai-partai membangun kapasitas organisasinya di level kota dan kabupaten akan menentukan kualitas representasi politik jangka panjang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka *party institutionalization* (pelembagaan partai) dari Harmel dan Svåsand (2002) sebagai landasan analitis utama. Kerangka ini dipilih karena memungkinkan analisis yang berlapis: pertama, dimensi *institutionalization internal*, yang mencakup rutinisasi (*routinization*) yakni bagaimana prosedur dan perilaku internal partai menjadi terpola, stabil, dan dapat diprediksi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dimensi infusi nilai (*value infusion*) yakni proses penanaman ideologi dan identitas kolektif ke dalam tubuh organisasi. Kedua, dimensi *institutionalization* eksternal, yang berkaitan dengan bagaimana partai membangun keterakaran sosial (*roots in society*) dan legitimasi di mata pemilih serta aktor-aktor sosial di luar partai. Ketiga, konsep *objective durability* (daya tahan objektif) dalam kerangka yang sama digunakan untuk mengevaluasi apakah capaian elektoral partai merupakan hasil institusionalisasi yang sejati atau sekadar euforia sesaat yang bergantung pada faktor eksternal. Kerangka Harmel dan Svåsand (2002) ini dilengkapi secara komplementer dengan teori personalisasi politik dari Budiatri dkk. (2018), yang membantu menjelaskan ketegangan


https://doi.org/10.58835/jspi.v6i3.748

antara kemajuan formal pelembagaan organisasi dengan realitas ketergantungan partai pada figur-figur sentral yang melengkapi fenomena ketokohan dalam konteks masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan latar belakang, kesenjangan penelitian, dan kerangka teori yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana proses institusionalisasi internal Partai NasDem Kota Padang pasca-Pemilu 2019 dilakukan melalui rutinisasi organisasi dan infusi nilai "Restorasi Indonesia"? Kedua, bagaimana faktor institusionalisasi eksternal khususnya pencalonan Anies Baswedan dan peran yang diasumsikan dipegang oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dimanfaatkan dalam strategi konsolidasi Partai NasDem Kota Padang menjelang Pemilu 2024? Ketiga, sejauh mana daya tahan objektif Partai NasDem Kota Padang dapat dinilai dari hasil integrasi konsolidasi internal dan eksternal tersebut, dan apakah ketahanan itu bersifat genuine atau bersyarat? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan strategi konsolidasi internal NasDem Kota Padang pasca-Pemilu 2019 melalui analisis rutinisasi dan infusi nilai; (2) menganalisis peran faktor eksternal dalam konversi popularitas figur menjadi kursi legislatif; dan (3) mengevaluasi daya tahan objektif partai sebagai hasil dari integrasi kedua proses institusionalisasi tersebut.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik *(intrinsic case study)*. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam suatu fenomena tertentu karena keunikannya (Fiantika, 2022), yakni untuk membedah fenomena spesifik lonjakan kursi Partai NasDem di DPRD Kota Padang dari satu menjadi tujuh kursi dalam satu siklus pemilu. Studi kasus intrinsik dipandang tepat karena fokus penelitian bukan pada generalisasi, melainkan pada pemahaman mendalam atas proses konsolidasi yang terjadi secara spesifik di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian menggunakan dua jenis data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sembilan informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan posisi dan keterlibatan langsung mereka dalam proses konsolidasi partai. Informan mencakup Sekretaris DPD, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD, Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPW, Ketua organisasi sayap GARPU, Ketua organisasi sayap pemuda, mantan anggota DPRD periode 2014–2019, dua anggota DPRD terpilih periode 2024–2029, serta seorang pengamat politik Kota Padang untuk keperluan triangulasi. Pemilihan informan didasarkan pada dua kriteria utama: keterlibatan dalam struktur formal partai atau organisasi pendukungnya, serta pengetahuan langsung terhadap dinamika konsolidasi pasca-Pemilu 2019. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, meliputi unggahan resmi akun Instagram @nasdempadang sejak 2021, pemberitaan media daring, dan dokumen-dokumen internal yang relevan.

Analisis data dilakukan secara emik dan etik (Maryam, 2018). Data emik difokuskan untuk menampilkan penjelasan sesuai sudut pandang informan, sementara data etik difungsikan sebagai interpretasi peneliti terhadap data lapangan dengan bersandar pada kerangka teori pelembagaan partai *(party institutionalization)* dari Harmel dan Svåsand (2002). Proses analisis mengikuti tiga tahap: reduksi data (memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian), penyajian data (menyusun temuan secara sistematis sesuai dimensi analisis), dan penarikan kesimpulan secara induktif dari pola-pola yang ditemukan di lapangan.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Guncangan Elektoral Pasca-Pemilu 2019 sebagai Titik Tolak Konsolidasi

Bagian hasil adalah temuan studi berdasarkan metode yang sudah dijalankan, dilaporkan. Bagian hasil harus menyatakan temuan penelitian yang disusun dalam urutan logis tanpa bias atau interpretasi. Bagian yang menjelaskan hasil sangat diperlukan jika makalah ini memasukkan data yang dihasilkan dari suatu uji statistik. Tujuan dari pembahasan adalah untuk menafsirkan dan menggambarkan signifikansi dengan masalah penelitian yang sedang diselidiki, dan untuk menjelaskan pemahaman atau wawasan baru tentang penyelesain masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian. Pembahasan akan selalu terhubung dengan pendahuluan dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis dan literatur yang ditinjau, tetapi tidak hanya mengulang atau mengatur ulang pendahuluan. Pembahasan harus selalu menjelaskan bagaimana studi saat ini telah memberikan kontribusi pemahaman pembaca tentang masalah penelitian dan solusinya. Hasil dan pembahasan dapat mencakup sub-judul dan sub-sub-judul.

Secara nasional, Partai NasDem pada Pemilu 2019 mencatatkan capaian positif dengan memperoleh 12,6 juta suara (9,05%), naik dari 8,4 juta suara (8,4%) pada 2014, dan menempatkannya pada posisi kelima nasional. Namun, tren ini berbanding terbalik dengan realitas di Kota Padang. Posisi NasDem sebagai pendukung garis keras Joko Widodo pada Pilpres 2019 terbukti tidak sejalan dengan preferensi politik masyarakat Minangkabau, sehingga partai menjadi "korban" dari pencalonan presiden yang diusungnya sendiri. Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh Mainwaring dan Zoco (2007) disebut sebagai volatilitas elektoral struktural di negara demokrasi baru, di mana loyalitas pemilih belum terikat kuat pada identitas partai melainkan sangat responsif terhadap perubahan afiliasi elite dan isu nasional yang dominan pada setiap siklus pemilu. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Padang, Syamsu Rizal:

> "...kita punya empat kursi di DPRD Kota terjun bebas menjadi satu kursi. Jadi itu dominan karena memang masih lekat persepsi publik bahwa partai ini, calon presiden yang diusung [tidak diterima masyarakat]." (Wawancara, 6 Mei 2026).

Guncangan elektoral ini diperparah oleh lemahnya manajemen organisasi pada periode 2014–2019. Seorang mantan anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Padang periode tersebut mengungkapkan bahwa rapat dan koordinasi internal partai sangat minim, sehingga empat anggota dewan yang ada saat itu "berjalan sendiri-sendiri" tanpa dukungan struktur partai yang solid di tingkat bawah (Wawancara, 6 Mei 2026). Kombinasi antara sentimen negatif eksternal (afiliasi dengan Jokowi) dan kerapuhan struktural internal inilah yang menjadi entry point sekaligus pemicu krisis yang memaksa elite Partai NasDem Kota Padang merumuskan ulang strategi secara fundamental sebelum menghadapi Pemilu 2024.

### Institusionalisasi Internal Melalui Rutinisasi: Restrukturisasi Organisasi dan Politik Tanpa Mahar

Langkah paling fundamental yang membedakan kesiapan NasDem pada 2024 dibandingkan 2019 adalah restrukturisasi organisasi secara menyeluruh. Pasca-Pemilu 2019, DPP melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang kehilangan kursi, termasuk Kota Padang, dan menempatkan kepengurusan baru di bawah Osman Ayub yang merupakan satu-satunya anggota dewan terpilih pada 2019 dan sebagai Ketua DPD, dengan Syamsu Rizal sebagai Sekretaris DPD. Berbekal struktur baru ini, partai menetapkan target realistis berdasarkan jumlah daerah pemilihan (dapil) yang ada saat itu, sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Efra Eka Putra:

> "Hitung-hitungannya, dapil saat itu masih 5. Semua dapil harus punya [kursi], dan yang sudah punya harus nambah satu. Maka muncul angka enam, dan alhamdulillah realisasi akhirnya melebihi target awal kami." (Wawancara, 11 Mei 2026)

Target tersebut diterjemahkan menjadi pembentukan struktur partai secara masif hingga ke akar rumput: setiap kecamatan dibentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan tujuh pengurus, dan setiap kelurahan dibentuk Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) dengan sebelas pengurus, sehingga total mencakup 11 DPC dan 104 DPRt dengan kurang lebih 1.200 kader penggerak yang seluruhnya didaftarkan melalui kartu tanda anggota (KTA). Restrukturisasi ini berlangsung jauh sebelum DPP menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden, yang mengindikasikan bahwa penguatan struktural ini bukan reaksi spontan terhadap momentum Anies, melainkan agenda pembenahan internal yang telah direncanakan sejak awal pasca-2019.

Aspek rutinisasi yang paling menonjol adalah penegakan kebijakan "Politik Tanpa Mahar" sebagai sebuah aturan baku yang memastikan bahwa proses pencalonan dan penomoran calon legislatif tidak didasarkan pada besaran kontribusi finansial kepada elite partai, melainkan melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) dan wawancara terbuka. Mekanisme ini sejalan dengan argumen Hazan dan Rahat (2010) bahwa metode seleksi kandidat yang lebih inklusif dan transparan tidak hanya menghasilkan calon yang lebih beragam, tetapi juga memperkuat legitimasi internal partai di mata kader dan publik, karena proses pencalonan yang adil dipersepsikan sebagai cerminan integritas partai secara keseluruhan. Kebijakan ini terbukti efektif menarik masuknya elite-elite pragmatis yang sebelumnya ragu untuk berkontestasi karena stigma "mahar politik". Seorang anggota DPRD terpilih periode 2024–2029 yang baru memulai karier politiknya menyatakan:

> "Stigma di luar kan sering bilang kalau mau nyaleg itu pasti butuh modal besar, apalagi buat bayar 'perahu' atau beli nomor urut ke partai. Tapi waktu saya berproses di NasDem, saya buktikan sendiri kalau hal itu nggak berlaku... Pengurus partai dari awal sampai akhir sama sekali tidak ada minta uang sepeser pun untuk syarat pencalonan saya." (Wawancara, 6 Juni 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa "Politik Tanpa Mahar" berfungsi ganda, di satu sisis sebagai instrumen rutinisasi yang mempolakan perilaku rekrutmen kader secara teratur, stabil, dan dapat diprediksi (Randall & Svåsand, 2002), sekaligus sebagai nilai jual yang strategis untuk menarik masuknya kalangan pengusaha dan tokoh petahana dari partai lain yang membawa modal sosial dan finansial mereka ke dalam struktur partai. Temuan ini sejalan dengan Razaqtiar (2016) yang menemukan bahwa Golkar Karanganyar juga menggunakan diklat fungsionaris sebagai instrumen rutinisasi pra-pilkada, namun berbeda dalam hal keberlanjutan. NasDem Kota Padang mempertahankan struktur tersebut lintas siklus pemilu, sementara konsolidasi Golkar Karanganyar berhenti setelah memenangkan pilkada. Tabel 2 merangkum perbandingan struktur dan tata kelola NasDem Kota Padang sebelum dan setelah Pemilu 2019.

**Tabel 2.** Perbandingan Struktur dan Tata Kelola Partai NasDem Kota Padang

| Aspek | Sebelum Pemilu 2019 | Pasca Pemilu 2019 |
|---|---|---|
| Kepemimpinan DPD | Di bawah kepengurusan lama | Restrukturisasi: Osman Ayub (Ketua), Syamsu Rizal (Sekretaris) |
| Struktur akar rumput | Cenderung pasif, sekadar syarat administratif | 11 DPC dan 104 DPRt aktif, ±1.200 kader penggerak |
| Rekrutmen kader | Tersendat akibat stigma partai tidak populer | Sistematis melalui *fit and proper test* dan "Politik Tanpa Mahar |
| Agenda internal | Minim rapat dan koordinasi rutin | Rapat dan pendidikan politik rutin (infusi nilai "Restorasi Indonesia") |

*Sumber: diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara, 2026*

**Institusionalisasi Internal Melalui Infusi Nilai: Restorasi Indonesia dan Akademi Bela Negara**

Selain rutinisasi struktural, NasDem Kota Padang juga melakukan infusi nilai (*value infusion*) secara hierarkis dan sistematis. Konsolidasi nilai ini bersifat vertikal: DPP menyusun materi dasar melalui Akademi Bela Negara (ABN), yang kemudian diteruskan oleh DPW kepada DPD dan diturunkan hingga tingkat DPC dan DPRt, dengan ruang penyesuaian konten sesuai konteks lokal. Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPW NasDem Sumatera Barat menjelaskan bahwa

> "yang melakukan konsolidasi itu semua memang dari pusat dan dari DPW, DPD... konsolidasinya itu semuanya vertikalnya jelas" (Wawancara, 12 Mei 2026).

Nilai utama yang diinternalisasi adalah "Restorasi Indonesia", sebuah gagasan yang secara nasional dimaknai sebagai upaya memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan fungsi pemerintahan sesuai cita-cita Proklamasi 1945. Pada level kader, gagasan ini diterjemahkan secara lebih praktis sebagai perubahan pola pikir dan cara pandang berpolitik. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Kota Padang menggambarkan hal ini sebagai upaya "memberikan roh Partai NasDem" kepada masyarakat yang belum mengenal partai secara merata, dengan menekankan bahwa restorasi berarti "meninggalkan kebiasaan lama" dan "melangkah ke alam sadar" politik yang baru (Wawancara, 13 Mei 2026).

Penanaman nilai ini tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara rutin dan terdokumentasi melalui unggahan media sosial resmi partai sejak 2021, mencakup pertemuan konsolidasi dengan bakal calon legislatif di tingkat dapil hingga orientasi dan pembekalan bagi pengurus DPC dan ranting. Integrasi antara rutinisasi (struktur dan aturan "Politik Tanpa Mahar") dengan infusi nilai ("Restorasi Indonesia" melalui ABN) inilah yang menjadi fondasi institusionalisasi internal NasDem


https://doi.org/10.58835/jspi.v6i3.748

Kota Padang sebagai upaya untuk memastikan bahwa kapasitas logistik dan sosial yang dibawa oleh elite baru benar benar terintegrasi ke dalam mesin partai, bukan sekadar relasi transaksional yang bersifat sesaat. Integrasi antara rutinisasi dan infusi nilai ini merepresentasikan apa yang oleh Panebianco (2024) disebut sebagai *organizational model* partai yang mapan, di mana identitas kolektif dan kesetiaan ideologis berfungsi sebagai perekat yang mengikat kader melampaui sekadar kalkulasi keuntungan elektoral jangka pendek.

**Realitas Hibrida: Personalisasi Politik dalam Bingkai Pelembagaan**

Meskipun indikator formal rutinisasi dan infusi nilai telah terpenuhi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tataran perilaku aktual (*actual behavior*), proses depersonalisasi mesin partai NasDem Kota Padang belum mengakar secara kuat. Roda organisasi pada praktiknya masih sangat bergantung pada figur-figur sentral: Osman Ayub di tingkat DPD yang membawa basis suara petahana, Fadly Amran di tingkat DPW sebagai pemegang komando strategi dan logistik pemenangan se-Sumatera Barat, serta otoritas mutlak Ketua Umum DPP dalam keputusankeputusan strategis. Seorang kader NasDem Kota Padang menyampaikan secara terbuka:

> "Roda partai rasanya baru benar-benar bergerak kencang kalau sudah ada instruksi langsung dari tokoh sentralnya... kepatuhan kawan-kawan kader di bawah ini sebenarnya lebih banyak didorong oleh loyalitas dan rasa segan kepada figur-figur tersebut dibandingkan pada sistem partainya itu sendiri." (Wawancara, 13 Mei 2026)

Temuan ini sejalan dengan argumen Budiatri dkk. (2018) bahwa mayoritas partai politik di Indonesia era reformasi terperangkap dalam personalisasi politik, yaitu kondisi ketika individu elite memiliki posisi dan pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan organisasi partainya. Rahat dan Kenig (2010) membedakan personalisasi dalam dua dimensi yakni personalisasi institusional, yang berkaitan dengan perubahan aturan formal yang memberikan lebih banyak kekuasaan pada individu, dan personalisasi media, yang berkaitan dengan semakin menonjolnya figur dibandingkan partai dalam liputan publik. Kasus NasDem Kota Padang menunjukkan keduanya berlangsung secara bersamaan, di mana figur sentral seperti Osman Ayub dan Fadly Amran mendominasi baik pengambilan keputusan formal maupun persepsi kader terhadap partai. Seorang pengamat politik di Kota Padang yang diwawancarai untuk triangulasi data menambahkan bahwa partai-partai non-kader di Indonesia, termasuk NasDem, cenderung mengandalkan ketokohan dan efek elektoral kandidat ketimbang kepatuhan murni terhadap sistem kepartaian (Wawancara, 9 Juni 2026).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsolidasi internal NasDem Kota Padang berada pada fase institusionalisasi hibrida yaitu sebuah kondisi ketika cangkang organisasi telah modern dan terstruktur secara formal (DPC, DPRt, KTA, aturan "Politik Tanpa Mahar"), namun roda penggeraknya tetap sangat personalistik. Otonomi pengambilan keputusan (*decisional autonomy*) di tingkat daerah masih lemah karena keputusan-keputusan krusial tetap bermuara pada karisma, otoritas, dan modal kapital figur-figur patron tersebut. Temuan ini memperkaya argumen Babas dan Hidayat (2024) yang menyebut koherensi internal sebagai titik lemah NasDem secara nasional, dengan menunjukkan bahwa di level lokal, justru personalisasi inilah yang secara paradoksal turut mempercepat proses rekrutmen elite dan akselerasi konsolidasi struktural. Berbeda dari temuan Kristiyanto dan Hanief (2022) yang mencatat depersonalisasi sebagai capaian PDI-P setelah dua dekade, NasDem Kota Padang dalam kurun lima tahun justru menunjukkan bahwa personalisasi bukan hambatan, melainkan akselerator awal konsolidasi yang menjadi sebuah temuan yang memperjelas asumsi bahwa depersonalisasi adalah prasyarat institusionalisasi.

**Memperluas Akar Sosial: Peran DPC, DPRt, dan Organisasi Sayap**

Struktur DPC dan DPRt yang dibangun secara masif tidak diposisikan sekadar sebagai pemenuhan syarat administratif verifikasi partai, melainkan diaktifkan sebagai mesin politik yang bertugas memetakan suara hingga level Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menjemput aspirasi warga secara langsung, termasuk advokasi isu sehari-hari seperti persoalan jaminan kesehatan (BPJS). Selain struktur DPC dan DPRt, NasDem Kota Padang juga mengoptimalkan organisasi sayap dan badan fungsional untuk menjangkau segmen pemilih secara spesifik: Garda Pemuda untuk kelompok muda, organisasi tani untuk basis petani, dan GARPU (Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM) untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Ketua GARPU menjelaskan bahwa organisasi sayap ini memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan identitas dan ruang partisipasi politik, "walaupun sebagai penambah suara... sebagai relawan" (Wawancara, 19 Mei 2026). Pergerakan organisasi sayap ini tidak dilakukan secara bebas, melainkan dievaluasi secara rutin oleh DPW melalui mekanisme *guidance*, misalnya dengan memeriksa apakah fraksi NasDem di DPRD pernah melakukan kunjungan kerja (reses) ke basis petani dan kelompok pemuda.

Temuan ini sejalan dengan argumen Scarrow (2015) bahwa partai-partai modern semakin menggeser strategi mobilisasi dari penggalangan anggota formal menuju pengembangan jaringan pendukung berlapis (*multi-speed membership*), yang menjelaskan bahwa relawan dan simpatisan organisasi sayap berfungsi sebagai jembatan antara mesin partai dengan segmen pemilih yang tidak terikat secara ideologis. Mekanisme evaluasi berjenjang ini memperkuat dimensi *systemness* organisasi secara struktural dan, dalam kerangka institusionalisasi eksternal, berfungsi membangun keterakaran sosial (*roots in society*) yang menjadi salah satu fondasi bagi relevansi partai di mata pemilih. Investasi pada perluasan jaringan sosial melalui organisasi sayap inilah yang menjadi salah satu basis bagi daya tahan objektif partai di masa depan, terlepas dari ada atau tidaknya figur pendulang suara seperti Anies Baswedan pada pemilu-pemilu berikutnya.

**Institusionalisasi Eksternal: Momentum Anies Baswedan dan Reposisi Peran LKAAM**

Pada dimensi institusionalisasi eksternal, pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh DPP NasDem menjadi titik balik (*turning point*) yang membuka struktur peluang politik bagi NasDem Kota Padang. Posisi NasDem pada 2019 sebagai pendukung garis keras Jokowi membuat partai tidak populer di mata pemilih Minangkabau; sebaliknya, pencalonan Anies sebagai figur dengan tingkat penerimaan tinggi di Sumatera Barat memberikan "narasi jualan" baru yang mudah diterima oleh mayoritas pemilih rasional. Namun, popularitas Anies semata tidak otomatis terkonversi menjadi kursi legislatif tanpa adanya

infrastruktur partai yang siap menangkapnya sebagaimana ditunjukkan oleh stagnasi kursi PKS dan Gerindra meskipun kedua partai tersebut juga memperoleh keuntungan dari isu nasional yang sama. Dengan demikian, momentum Anies berfungsi sebagai pembuka pintu (*opportunity structure*), sementara konversi menjadi kursi sepenuhnya ditentukan oleh kesiapan mesin partai di tingkat lokal yang telah dibangun melalui institusionalisasi internal. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan Golder (2006) bahwa efek ekor jas (*coattail effect*) dari kandidat presiden terhadap perolehan kursi legislatif partai tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada kapasitas organisasi lokal dalam mengkapitalisasi popularitas figur tersebut. Partai dengan mesin lokal yang lemah cenderung gagal menerjemahkan efek ekor jas menjadi kursi nyata.

Temuan yang secara khusus menjadi kontribusi baru penelitian ini adalah mengenai peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Asumsi awal penelitian, yang dibangun berdasarkan pemberitaan media mengenai kehadiran tokoh NasDem dalam acara-acara LKAAM bersama Anies Baswedan (Demokratis, 2023), menduga bahwa LKAAM berperan sebagai cultural broker (Stovel & Shaw, 2012) yang memberikan legitimasi adat secara terstruktur bagi NasDem. Namun, analisis lapangan terhadap data primer membantah asumsi tersebut. Kehadiran figur-figur NasDem dalam kegiatan LKAAM ditemukan bersifat incidental terjadi karena afiliasi atau undangan personal kepada individu tertentu, bukan karena adanya kerja sama institusional resmi antara DPD NasDem dan LKAAM sebagai bagian dari desain pemenangan eksternal partai.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa konsolidasi eksternal NasDem Kota Padang lebih bertumpu pada kapitalisasi popularitas figur Anies secara langsung di ruang publik, bukan pada mobilisasi institusi adat secara terstruktur. Hal ini sekaligus menjadi catatan kritis bagi penelitianpenelitian mendatang agar tidak terlalu cepat menyimpulkan adanya kerja sama institusional antaraktor politik dan sosial-budaya hanya berdasarkan kedekatan personal yang tampak di permukaan media.

### Daya Tahan Objektif (*Objective Durability*): Capaian yang Rentan

Integrasi antara pembenahan mesin internal (rutinisasi dan infusi nilai) dengan kapitalisasi momentum eksternal (pencalonan Anies) pada akhirnya bermuara pada capaian daya tahan objektif. Kemampuan NasDem Kota Padang untuk bertahan dari guncangan kekalahan telak pada 2019 dari empat kursi menjadi satu kursi dan kemudian bangkit meraih tujuh kursi pada 2024 membuktikan bahwa partai ini memiliki survivability yang nyata di tengah dinamika politik lokal yang cair. Akan tetapi, daya tahan ini bersifat rentan dan bersyarat (*contingent*). Sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya, kemenangan 2024 didorong oleh perpaduan antara modal finansial calon legislatif berlatar pengusaha, basis suara petahana yang dibawa oleh tokoh-tokoh tertentu, dan efek ekor jas figur Anies Baswedan. Hal ini mempertegas temuan Babas dan Hidayat (2024) yang menyebut akar sosial sebagai kelemahan utama NasDem secara nasional, sambil menunjukkan bahwa di level lokal, ketergantungan pada figur eksternal dapat mengkompensasi kelemahan tersebut dalam jangka pendek.

Tiga faktor tersebut yang seluruhnya bersifat personalistik dan situasional. Pertanyaan kritis yang mengemuka dari temuan ini adalah: apakah loyalitas pemilih yang terbentuk pada 2024 murni merupakan hasil pelembagaan partai sebagai institusi, ataukah sekadar euforia elektoral sesaat yang terikat pada kehadiran figur-figur tertentu? Penelitian ini menyimpulkan bahwa NasDem Kota Padang berada pada titik keseimbangan yang rapuh antara kedua kemungkinan tersebut, sehingga ujian sesungguhnya terhadap pelembagaan partai ini baru akan terlihat pada pemilu-pemilu mendatang, terutama jika variabel ketokohan eksternal seperti Anies Baswedan tidak lagi tersedia.

## CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa lonjakan perolehan kursi Partai NasDem di DPRD Kota Padang dari satu kursi pada Pemilu 2019 menjadi tujuh kursi pada Pemilu 2024 bukan merupakan hasil otomatis dari efek ekor jas pencalonan Anies Baswedan, melainkan hasil integrasi antara institusionalisasi internal dan institusionalisasi eksternal yang bermuara pada daya tahan objektif partai. Institusionalisasi internal dicapai melalui rutinisasi, yaitu restrukturisasi organisasi hingga membentuk 104 DPRt dengan sekitar 1.200 kader serta penegakan kebijakan "Politik Tanpa Mahar" yang efektif menarik elite pragmatis dari kalangan pengusaha dan politisi petahana yang diperkuat dengan infusi nilai "Restorasi Indonesia" melalui pendidikan politik berjenjang sejak DPP hingga DPRt. Namun, capaian ini menyisakan realitas hibrida: di balik struktur formal yang modern, roda penggerak partai tetap sangat bergantung pada figurfigur sentral seperti Osman Ayub dan Fadly Amran, sehingga proses depersonalisasi belum mengakar sepenuhnya.

Pada dimensi eksternal, pencalonan Anies Baswedan berhasil mengembalikan relevansi NasDem di mata pemilih rasional Minangkabau yang sebelumnya menjauh akibat asosiasi partai dengan Jokowi pada 2019. Sementara itu, temuan mengenai peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menunjukkan bahwa kedekatan yang tampak di permukaan bersifat insidental dan personal, bukan bagian dari konsolidasi eksternal yang terstruktur sebagaimana diasumsikan sebelumnya. Secara keseluruhan, NasDem Kota Padang telah membuktikan *survivability*-nya dalam menghadapi guncangan elektoral, tetapi daya tahan objektif tersebut masih rentan karena bertumpu pada kombinasi pragmatisme elektoral dan personalisasi politik yang belum teruji keberlanjutannya tanpa kehadiran figur-figur eksternal maupun internal yang saat ini menjadi penggerak utama.

Secara teoretis, temuan ini menyarankan perlunya eksplorasi lebih lanjut mengenai batas antara pelembagaan partai dan personalisasi politik, khususnya untuk menjawab pertanyaan keberlanjutan partai apabila tokoh-tokoh sentral tidak lagi menjabat di masa depan. Studi komparatif antara Kota Padang dengan daerah lain di Sumatera Barat yang tidak mengalami lonjakan kursi signifikan juga diperlukan untuk mengisolasi variabel-variabel lokal yang spesifik bekerja dalam kasus ini. Sebagai studi kasus tunggal, penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke konteks daerah lain. Selain itu, karena sebagian besar informan merupakan aktor internal partai, perspektif pemilih yang tidak memilih NasDem tidak terwakili, sehingga narasi keberhasilan konsolidasi yang tersaji cenderung bersumber dari satu sisi. Secara praktis, partai disarankan untuk mulai mentransisikan ketergantungan pada figur sentral menuju penguatan ideologi "Restorasi Indonesia" yang lebih substantif, serta memberikan peran nyata bagi struktur DPC dan DPRt di luar masa kampanye agar mesin partai tidak "mati suri" pasca-pemilu.


https://doi.org/10.58835/jspi.v6i3.748

## REFERENCES


Anawati, D. M., & Al-Hamdi, R. (2020). Soliditas Partai dan Stabilitas Perolehan Suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *10*(1), 105–125. https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.4636

Asrinaldi, & Yusoff, M. A. (2023). Power consolidation and its impact on the decline of democracy in Indonesia under President Jokowi. *Cogent Social Sciences*, *9*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2232579

Babas, U., & Hidayat, C. (2024). Proposing the Importance of the "Compromise Ability" Component in the Institutional Dimension: A Study of the National Democratic Party (NasDem). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *8*(4), 2617. https://doi.org/10.58258/jisip.v8i4.7606

Basedau, M., & Stroh, A. (2011). Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties. *SSRN Electronic Journal*, *February*. https://doi.org/10.2139/ssrn.1119203

Budiatri, A., & Dkk. (2018). Konstelasi Politik Di Tahun Elektoral Resume Penelitian. *Jurnal Penelitian Politik*, *15*(2).

Deni, A. 2016. Konsolidasi Demokrasi: Perbaikan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Naufan Pustaka*

Faedlulloh, D., Sulistiowati, R., Apandi, A., & Karmilasari, V. (2023). Oligarchy and Elite Politics in The 2020 Local Election: Short Review. *Journal of Political Issues*. 5(1): 1-15 https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.113

Fiantika, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin*. https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en

Golder, M. (2006). Presidential coattails and legislative fragmentation. *American Journal of Political Science*, *50*(1), 34–48. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00168.x

Ivanny, J. C. 2023. Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 11-20

Kristiyanto, H., & Hanief, A. (2022). Ideological Strengthening, Strategic Leadership, and Depersonalization: the Transformation of the Indonesian Democratic Party of Struggle 1999-2019. *CosmoGov*, *8*(1), 46. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v8i1.38447

Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, *4*(2), 128–145.

Maryam, S. (2018). Studi Komparasi Emik Dan Etik Masyarakat Terhadap Menjamurnya Tayangan Drama Asing Di Indonesia: Kajian Antropologi Kontemporer. *GENTA BAHTERA: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan*, *3*(1), 91–105. https://doi.org/10.47269/gb.v3i1.8

Mietzner, M. (2025). Flirting with Autocracy in Indonesia: Jokowi's Majoritarianism and its Democratic Legacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *44*(3 Special Section: Presidentialism and Democracy in Indonesia), 366–384. https://doi.org/10.1177/18681034251318053

Musella, F., & Vercesi, M. (2019). Definitions and measures of party institutionalization in new personal politics: The case of the 5 star movement. *Zeitschrift Fur Vergleichende Politikwissenschaft*, *13*(2), 225–247. https://doi.org/10.1007/s12286-019-00422-8

Panebianco, A. (2024). *Political parties: organization and power*. *2*, 306–312.

Rahat, G., & Kenig, O. (2010). *From Party Politics to Personalized Politics? Party Change and Political Personalization in Democracies*.

Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party institutionalization in new democracies. *Party Politics*, *8*(1), 5–26. https://doi.org/10.1177/1354068802008001001

Razaqtiar, A. Z. (2016). Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono - Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. *Jurnal Politk Muda*, *5*(3), 353–361.

Royyan, M. N., Sulaksono, T., & Wijaya, J. H. (2022). Konsolidasi Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemenangan Pilkada Pasca Konflik Internal Partai. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, *4*(1), 59–71. https://doi.org/10.18196/jpk.v4i1.18445

Sakti, A. M. S., & Al-Hamdi, R. 2020. Strategi kampanye partai nasionalis: pengalaman partai NasDem pada pemilu 2019. *Jurnal Politik Profetik* https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a7

Scarrow, S. E. (2015). Beyond Party Members: Changing Approaches to Partisan Mobilization. *Oxford University Press*.

Stovel, K., & Shaw, L. (2012). Brokerage. *Annual Review of Sociology*, *38*, 139–158. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150054

Surya, A. R. F. (2025). *Coattail Effect Anies Baswedan TerhadapPeningkatan Perolehan Suara Partai Nasdem diKota Padang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*.

TagarId. 2019. Penyebab Jokowi Kalah Telak di Sumatera Barat diakses dari https://www.tagar.id/penyebab-jokowi-kalah-telak-di-sumatera-barat pada 12 Januari 2026